



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

**Sistem Informasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
(UAKPPA)**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (418333)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

**Jl. Imam Bonjol No. 37, Melayu, Tenggarong
Kutai Kartanegara – KALIMANTAN TIMUR**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tenggarong, 31 Desember 2024
Kepala LAPAS Perempuan Tenggarong



TRIANA AGUSTIN
NIP. 19820828 200012 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	
- Laporan Keuangan dari e-rekon	
- Laporan Posisi Barang Milik Negara dan Persediaan di Neraca	
- Laporan Realisasi Anggaran	
- Neraca	
- Laporan Operasional	
- Laporan Perubahan Ekuitas	
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah	
- Rekapitulasi Akun	
- Berita Acara Rekonsiliasi	
- Input Analisis	
- Lpj Bendahara Pengeluaran	
- Copy Petikan DIPA Tahun Anggaran 2024	
- Copy Rekening Koran per 31 Desember 2024	
- Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 37, Melayu, Tenggarong, KUKAR
Telepon.0811.559.8333
Email: lpp.smd@gmail.com, span418333@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tenggarong, 31 Desember 2024

Kepala LAPAS Perempuan Tenggarong


IRIANA AGUSTIN
NIP. 19820828 200012 2 001

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
046.9.BF.5252.BDC.002	Pembinaan Keperibadian dan Layanan Integrasi Narapidana	106.744.000	106.744.000	100	285	285	Orang	100	
046.9.BF.5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.332.662.000	2.332.577.478	99,996	285	285	Orang	100	
046.9.BF.5252.BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	38.300.000	38.300.000	100	20	20	Orang	100	
046.9.BF.5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	32.288.000	32.288.000	100	12	12	Layanan	100	
046.9.WA.6231.EBA.956	Layanan BMN	8.330.000	8.330.000	100	1	1	Layanan	100	
046.9.WA.6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4.564.000	4.564.000	100	1	1	Layanan	100	
046.9.WA.6231.EBA.962	Layanan Umum	39.990.000	39.989.100	99,998	1	1	Layanan	100	
046.9.WA.6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.547.886.000	4.547.796.886	99,998	1	1	Layanan	100	
046.9.WA.6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	43.501.000	43.501.000	100	60	60	Orang	100	
046.9.WA.6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12.170.000	12.165.665	99,964	1	1	Layanan	100	
046.9.WA.6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.930.000	2.929.400	99,980	1	1	Layanan	100	
046.9.WA.6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	7.220.000	7.220.000	100	1	1	Layanan	100	
046.9.WA.6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	13.204.000	13.201.100	99,978	1	1	Layanan	100	
	Subtotal	7.189.789.000	7.189.606.629	99,997				99,997	
	Penyesuaian Revisi DIPA/ Pengembalian Belanja/dll								
	Total								

Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp44.998.369,- atau mencapai 239.00% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.18.800.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp7.189.606.173,- atau mencapai 100.00% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.189.789.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester II 31 Desember 2024. Nilai Aset pada Semester II per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.518.510.293,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp511.545.029,-; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp15.006.965.264,-; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp283.562.981,- dan Rp15.518.510.293,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Semester II 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.500.479,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah

sebesar Rp8.625.965.723,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp423.196.203,-) Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp8.126.000.607,-) dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp16.718.465.851,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada Semester II 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.446.537.241,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp16.718.465.851,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp8.504.867,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.515.380.789,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp15.234.947.312,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun Anggaran 2024 dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Semester II untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

//

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18.800.000	44.998.369	239,35	37.822.428
JUMLAH PENDAPATAN		18.800.000	44.998.369	239,35	37.822.428
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	3.506.852.000	3.506.798.639	100,00	3.234.082.265
Belanja Barang	B.4	3.682.937.000	3.682.807.534	100,00	4.033.865.187
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		7.189.789.000	7.189.606.173	100,00	7.267.947.452
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		7.189.789.000	7.189.606.173	100,00	7.267.947.452

II. NERACA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	511.545.029	631.249.754
Jumlah Aset Lancar		511.545.029	631.249.754
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.134.365.660	1.134.365.660
Peralatan dan Mesin	C.15	7.831.155.756	7.738.430.388
Gedung dan Bangunan	C.16	10.951.888.797	19.403.517.057
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	69.620.176	69.620.176
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.980.065.125)	(4.511.777.864)
Jumlah Aset Tetap		15.006.965.264	23.834.155.417
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.24	-	113.183.629
Jumlah Aset Lainnya		-	113.183.629
JUMLAH ASET		15.518.510.293	24.578.588.800
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	280.295.661	123.007.239
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	3.267.320	9.044.320
Hibah Yang Belum Disahkan	C.28	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		283.562.981	132.051.559
JUMLAH KEWAJIBAN		283.562.981	132.051.559
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	15.234.947.312	24.446.537.241
JUMLAH EKUITAS		15.234.947.312	24.446.537.241
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.518.510.293	24.578.588.800

III. LAPORAN OPERASIONAL

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	33.500.479	28.778.108
JUMLAH PENDAPATAN		33.500.479	28.778.108
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.506.798.639	3.234.082.265
Beban Persediaan	D.3	629.145.763	540.214.763
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.170.529.883	3.448.028.660
Beban Pemeliharaan	D.5	323.748.799	369.178.596
Beban Perjalanan Dinas	D.6	406.180.443	253.498.305
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.481.658.114	1.481.658.114
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		9.518.061.641	9.326.660.703
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.484.561.162)	(9.297.882.595)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	592
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	592
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.484.561.162)	(9.297.882.003)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(9.484.561.162)	(9.297.882.003)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN TENGGARONG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	24.446.537.241	14.383.225.159
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16.718.465.851)	(9.020.383.818)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(8.504.867)	11.007.342
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(8.504.867)	11.007.342
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		(8.504.867)	11.007.342
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.515.380.789	19.072.688.558
EKUITAS AKHIR	E.6	15.234.947.312	24.446.537.241

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesadaran, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima lagi oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (pasal 1 UU No. 12 tahun 1995).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemasyarakatan memiliki Visi dan Misi yaitu :

VISI

“Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan di dukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan”.

MISI

Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dan sistematis dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkelanjutan.

Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stake holder.

Tujuan tersebut tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang di tuangkan dalam 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan, yaitu :

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Menjauhi pidana bukan hukuman balas dendam dari negara
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan peyiksaan, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/ lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat
9. Narapidana hanya dijatuhi masa kehilangan kemerdekaan.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi Rehabilitasi korektif dan edukatif.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola

oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarrong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarrong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

Pengukuran

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	100%

	tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**Aset
Lainnya**

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal untuk penyesuaian kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Hal III DIPA.

Realisasi
Pendapatan
Rp
44.998.369,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Semester II per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.998.369,- atau mencapai 239,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.800.000,-. Pendapatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Kemandirian warga binaan pemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan pajak	18.800.000	44.998.369	239%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	18.800.000	44.998.369	

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Semester II per 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan 15,95 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan produksi kegiatan Kemandirian berupa menjahit, handycraft, tata boga dan pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong, selain itu di Tahun 2024 belum terdapat estimasi penerimaan PNPB.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak	44.998.369	37.822.000	15.95%
Jumlah	44.998.369	37.822.000	

Realisasi

Belanja Negara

Rp7.189.789.0

00,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp3.737.944.159,- atau 53% dari anggaran belanja sebesar Rp7.076.800.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

Uraian	SEMESTER I 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.506.852.000	3.506.798.639	100,00
Belanja Barang	3.682.937.000	3.682.807.534	100,00
Belanja Modal	-	-	0
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	7.189.789.000	7.189.606.173	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	7.189.789.000	7.189.606.173	100,00

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan berarti dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Lapas Perempuan Tenggarong melaksanakan penyerapan anggaran BAMA yang merupakan anggaran dengan persentase terbesar dari PAGU Belanja Barang, Belanja barang menjadi turun disebabkan banyak nya jumlah napi yang bebas.
2. Lapas Perempuan Tenggarong memiliki tambahan

pegawai baru sebanyak 3 (tiga) orang sehingga penyerapan pada Belanja Pegawai penyerapan lebih besar.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.506.798.639	3.234.082.265	8,43
Belanja Barang	3.682.807.534	4.033.865.187	(8,70)
Belanja Modal		-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Jumlah	7.189.606.173	7.267.947.452	(1,08)

*Belanja
Pegawai
Rp1.871.665.7
72,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.506.798.639,- dan Rp3.234.082.265,- Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 mengalami Kenaikan 8,43% dari Realisasi Belanja Pegawai TA 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penabahan CPNS sebanyak 3 (tiga) orang.

*Belanja
Barang
Rp3.682.807.53
4,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.682.807.534,- dan Rp4.033.865.187,- Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 8,7% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah warga binaan pemasyarakatan dari anggaran yang sudah ditentukan sehingga mengalami penurunan pembayaran bahan makanan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.233.400.856	2.715.430.788	(17,75
Belanja Barang Persediaan	266.120.455	289.637.567	(8,12
Belanja Jasa	214.283.979	189.152.875	13,29
Belanja Barang Non Operasional	250.072.812	269.312.546	(7,14
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	406.180.443	253.498.305	60,23
Belanja Pemeliharaan	312.748.989	316.833.106	
Jumlah Belanja Kotor	3.682.807.534	4.033.865.187	(8,70
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	3.682.807.534	4.033.865.187	(8,70

Belanja Modal

Rp0,-

B.5 Belanja Modal

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Semester II 31 Desember 2024.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah pada Semester II 31 Desember 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester II 31 Desember 2024.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester II 31 Desember 2024.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Gedung pada Semester II 31 Desember 2024.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Semester II 31 Desember 2024.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Semester II 31 Desember 2024.

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp60.000.000,- per 31 Desember 2024. Pesediaan Uang Persediaan untuk Operasional Perkantoran.

*Piutang
Lainnya
Rp217.803,-*

C.2 Piutang Lainnya

Saldo Kas Piutang Lainnya Rp217.803,- per 31 Desember 2024. Terdapat Piutang lainnya atas Potongan Gaji Sewa Rumah Pegawai. Akun tersebut timbul disebabkan ADK Pegawai di UPT sebelumnya belum terhapus pada pengajuan gaji di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

*Barang
Konsumsi
Rp511.545.029,-*

C.3 Barang Konsumsi

Saldo Kas Barang Konsumsi Rp511.545.029,- per 31 Desember 2024. Barang Konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk keperluan perkantoran bersifat sekali habis.

*Tanah
Rp1.134.365.660*

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-

masing sebesar Rp.1.134.365.660,- tidak ada perubahan angka.

Peralatan Dan C.5 Peralatan dan Mesin

Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31
Rp7.831.155.7 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing
56,- sebesar Rp.7.738.430.388,- dan 7.831.155.756,-.

Gedung dan C.6 Gedung dan Bangunan

Bangunan Terdapat Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023
Rp10.951.888. dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar
797,- Rp.19.403.517.057,- dan 10.951.888.797,-. Penurunan
Saldo disebabkan karna adanya Aset Tetap yang tidak
digunakan dalam operasi pemerintahan.

Akumulasi C.8 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Penyusutan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember
Peralatan dan 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar
Mesin Rp.3.063.281.992,- dan 3.665.838.466,-.
Rp3.665.838.4
66,-

Akumulasi C.9 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Penyusutan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 31
Gedung dan Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing
Bangunan sebesar Rp1.448.495.872- dan Rp1.314.226.659,-
Rp1.314.266.6
59,-

Belanja

Barang Yang

Masih Harus

Dibayar

Rp280.295.66

1,-

C.10 Belanja barang yang masih harus di bayar

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp280.295.661,- per 31 Desember 2024. Merupakan kewajiban Hutang Bama Bulan November dan Desember 2024 serta Pembayaran Langganan Jasa Listrik, PDAM, Telpon dan Internet

Pendapatan

Sewa diterima

dimuka

Rp3.267.320,-

C.11 Pendapatan Sewa diterima dimuka

Pendapatan Sewa diterima dimuka senilai Rp3.267.320,- per 31 Desember 2024. Merupakan sewa koperasi yang telah dibayarkan pada masa 01 Juli 2023 s/d 01 Juli 2024.

Ekuitas

Rp24.446.537.2

41,-

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.383.225.159,- dan 24.446.537.241,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Koreksi Nilai

Aset Tetap

Non Revaluasi

Rp8.504.867,-

C.13 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp8.504.867,- per 31 Desember 2024. Merupakan Koreksi atas nilai Handy Talky (HT) Pengiriman dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

*Pendapatan
Sewa Tanah,
Gedung dan
Bangunan
Rp7.301.731,-*

C.14 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp7.301.731,- per 31 Desember 2024. Merupakan Pemanfaatan Aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan oleh pihak ketiga yang dimana berupa sewa koperasi.

*Pendapatan
Pelayanan dan
Administrasi
Hukum Lainnya
Rp26.198.748,-*

C.15 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya

Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya senilai Rp26.198.748,- per 31 Desember 2024. Merupakan Pendapatan berupa PNBP Hasil Penjualan Barang/ Jasa lainnya dari Kegiatan Kemandirian Warga Binaan.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp22.395.053,
-*

Nilai Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp15.743.938,- dan Rp22.395.053. Nilai tersebut adalah pendapatan jasa lainnya dan dari pendapatan penerimaan kembali belanja Modal.

*Beban
Pegawai
Rp3.506.798.6
39,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.234.082.265,- dan Rp3.506.798.639,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN JENIS BEBAN	SMT 2 TH 2024	SMT 2 th 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.390.616.690	2.164.822.060	10,43
Beban Pemblatan Gaji PNS	41.950	41.329	1,50
Beban Tunj Suami/Istri PNS	107.068.938	108.697.974	(1,50)
Beban Tunj Anak PNS	35.648.542	30.587.770	16,55
Beban Tunj Struktural PNS	90.900.000	93.600.000	(2,88)
Beban Tunj Fungsional PNS	152.040.000	152.520.000	(0,31)
Beban Tunj PPH PNS	7.650.535	2.686.072	184,82
Beban Tunj Beras PNS	132.673.440	129.849.060	2,18
Beban Uang Makan PNS	556.786.000	531.138.000	4,83
Beban Tunj Umum PNS	8.775.000	2.405.000	264,86
Beban Uang Lembur PNS	24.598.000	17.735.000	38,70
Jumlah	3.506.799.095	3.234.082.265	8,43

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp266.120.45
5,-*

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp289.637.567,- dan Rp266.120.455,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

URAIAN JENIS BEBAN	S2 TH 2024	S2 TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	266.120.455	289.637.567	-8,12
Beban Persediaan Amunisi	0	0	0,00
Jumlah	266.120.455	289.637.567	

Beban Barang dan Jasa
Rp2.697.757.647,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.173.896.209,- dan Rp2.697.757.647,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	S2 TH 2024	S2 TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	100.707.421	77.108.133	30,61
Beban Pengadaan BAMA	2.017.715.796	2.466.630.899	-18,20
Beban Penambah Daya TAHAN TUBUH	51.552.139	55.298.868	-6,78
Beban Pengiriman surat Dinas	629.500	1.192.888	-47,23
Beban Honor Operasional Satker	62.796.000	115.200.000	-45,49
Beban Operasional Lainnya	0	0	0,00
Beban Brng Operasional COVID	0	0	0,00
Belanja Bahan	141.743.600	146.335.100	-3,14
Belanja Honor Output Keg	680.000	680.000	0,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	107.649.212	122.297.446	-11,98
Belanja barang Non Operasional COVID	0	0	0,00
Beban Langganan Listrik	89.007.500	76.645.700	16,13
Bebab Langganan Telepon	1.968.779	2.177.875	-9,60
Beban Langganan Air	72.410.700	50.889.300	42,29
Beban Jasa Profesi	31.800.000	42.400.000	-25,00
Beban Jasa Lainnya	19.097.000	17.040.000	12,07
Jumlah	2.697.757.647	3.173.896.209	

Beban

Pemeliharaan

Rp312.748.98

9,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Nilai Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp316.833.106,- dan Rp312.748.988,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

URAIAN JENIS BEBAN	S1 TH 2024	S1 TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.762.500	214.045.030	-14,15
Beban Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.915.000	3.981.000	48,58
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123.071.489	98.807.076	24,56
Jumlah	312.748.989	316.833.106	

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp406.180.44

3,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp253.498.305,- dan Rp406.180.443,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	S1 TH 2024	S1 TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	331.330.443	163.598.305	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.850.000	89.900.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	
Jumlah	406.180.443	253.498.305	

Beban Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban

Bantuan

Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp794.592.27

1,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.481.658.114,- dan Rp794.592.271,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
-Rp8.126.000.
607,-

D.11 Suplus Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus/Defisit pelepasan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan -Rp8.126.000.607,- (Beban Persediaan Rusak/Usang) adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	S1 TH 2024	S1 TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	14.545.000	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	8.123.223.250	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17.322.357	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-8.126.000.607	0	

*)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat saldo nilai pos luar biasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp24.446.537.241,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal UAKPA 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.383.225.159,- dan Rp24.446.537.241,-

Defisit LO

-16.718.465.851,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp16.718.465.851,-) dan (Rp9.020.383.818,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi

Ekuitas -

Rp8.504.867,-

E.3.2 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan yang terjadi pada periode sebelumnya. Pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp8.504.867,-) dan Rp11.007.342,- yang merupakan Koreksi Handy Talky dari temuan BPK Tahun 2023.

Selisih

Revaluasi Aset Tetap Rp.0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp8.504.867,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp11.007.342,- dan (Rp8.504.867,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-

Lain Rp0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi

Antar Entitas

Rp7.515.380.789,

-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.072.688.558,- dan Rp7.515.380.789,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada

periode per 31 Desember 2024, tidak terdapat DDEL DKEL.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Tidak terdapat Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ekuitas Akhir

Rp15.234.947.31

2,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.446.537.241,- dan Rp15.234.947.312,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan lain-lain setelah tanggal neraca yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN TENGGARONG
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2022	Tahun 2023	Per 31-12-2023	Tahun 2024
A	Tanah						
1	Tanah	-	1.134.365.660	-	-	-	1.134.365.660
	Jumlah		1.134.365.660	-	-	-	1.134.365.660
B	Peralatan dan Mesin	2024	7.369.025.377	369.405.011	7.738.430.388	92.725.368	7.831.155.756
1	Alat Angkutan Darat Bermotor						
2	Alat Kantor						
3	Alat Rumah Tangga						
4	Alat Komunikasi						
5	Komputer Unit						
6	Peralatan Komputer						
7	Peralatan Olah Raga						
	Jumlah		7.369.025.377	-	-	-	7.831.155.756
C	Gedung dan Bangunan	2024	19.445.655.057	(42.138.000)	19.403.517.057	(8.451.628.260)	10.951.888.797
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal						
	Jumlah		19.445.655.057	-	-	-	10.951.888.797
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik						
2	Jaringan Telepon						
	Jumlah		0	-	-	-	-
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan					-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
F	Aset Tetap Lainnya						69.620.176
1	Monografi					-	-
2		-		-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	69.620.176
G	Aset Lainnya						113.183.629
1	Aset Tak Berwujud*				-	-	-
2	Aset yang dihentikan penggunaannya				-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	113.183.629
Total			27.949.046.094	-	-	-	20.100.214.018

* Beban Amortisasi



KUALA PENGUNA ANGGARAN,

TRIANA AGUSTIN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 ESELON I : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 23/01/25 12:52 AM
 Tgl Cetak : 23/01/25 10:46 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	33,500,479	28,778,108	4,722,371	16.41
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	33,500,479	28,778,108	4,722,371	16.41
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	33,500,479	28,778,108	4,722,371	16.41
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,506,798,639	3,234,082,265	272,716,374	8.433
Beban Persediaan	629,145,763	540,214,763	88,931,000	16.462
Beban Barang dan Jasa	2,965,499,808	3,170,529,883	(205,030,075)	(6.467)
Beban Pemeliharaan	323,748,799	369,178,596	(45,429,797)	(12.306)
Beban Perjalanan Dinas	406,180,443	253,498,305	152,682,138	60.23
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

ESELON I

: (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI

: (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 23/01/25 12:52 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 10:46 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	794,592,271	1,481,658,114	(687,065,843)	(46.371)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	8,625,965,723	9,049,161,926	(423,196,203)	(4.677)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,592,465,244)	(9,020,383,818)	427,918,574	(4.744)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(8,108,678,250)	0	(8,108,678,250)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	14,545,000	0	14,545,000	
Beban Pelepasan Aset	8,123,223,250	0	8,123,223,250	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(17,322,357)	0	(17,322,357)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17,322,357	0	17,322,357	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(8,126,000,607)	0	(8,126,000,607)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(16,718,465,851)	(9,020,383,818)	(7,698,082,033)	85.341
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(16,718,465,851)	(9,020,383,818)	(7,698,082,033)	85.341

Keterangan :

FINAL

Tenggarong, 23 Januari 2025

Penganggung Jawab UAKPA

Kedua



TRIANA AGUSTIN

NIP. 198208282000122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 23/01/25 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 10:47 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,446,537,241	14,383,225,159	10,063,312,082	69.97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16,718,465,851)	(9,020,383,818)	(7,698,082,033)	85.34
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(8,504,867)	11,007,342	(19,512,209)	(177.27)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(8,504,867)	11,007,342	(19,512,209)	(177.27)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,515,380,789	19,072,688,558	(11,557,307,769)	(60.6)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(9,211,589,929)	10,063,312,082	(19,274,902,011)	(191.54)
EKUITAS AKHIR	15,234,947,312	24,446,537,241	(9,211,589,929)	(37.68)

Keterangan :

FINAL

Tenggarong, 23 Januari 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kepala
 ERANA AGUSTIN
 NIP. 198208282009122001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PEMASYARAKATAN 05
SATUAN KERJA : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG 418333

Tgl Data : 23/01/25 12:52 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 10:47 AM
Halaman : 1
lap_jra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,800,000	44,998,369	26,198,369	239	16,827,000	37,822,428	(20,995,428)	225
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,800,000	44,998,369	26,198,369	239	16,827,000	37,822,428	(20,995,428)	225
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	18,800,000	44,998,369	26,198,369	239	16,827,000	37,822,428	(20,995,428)	225
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,189,789,000	7,189,606,173	(182,827)	100	7,287,766,000	7,267,947,452	29,818,548	100
1. Belanja Pegawai	3,506,852,000	3,506,798,639	(53,361)	100	3,250,500,000	3,234,082,265	16,417,735	99
2. Belanja Barang	3,682,937,000	3,682,807,534	(129,466)	100	4,047,266,000	4,033,865,187	13,400,813	100
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PEMASYARAKATAN 05
SATUAN KERJA : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG 418333

Tgl Data : 23/01/25 12:52 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 10:47 AM
Halaman : 2
lap_jra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024			2023		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	7	8	9
			%			%
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,189,789,000	7,189,606,173	(182,827)	7,297,766,000	7,267,947,452	29,818,548
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0
			100			100

Keterangan :
FINAL



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 418333
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/01/25 10:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,916,872,000	2,390,863,000	2,390,816,690	0	2,390,816,690	100	46,310
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,000	44,000	41,950	456	41,494	95.34	2,506
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	208,759,000	107,070,000	107,068,938	0	107,068,938	100	1,062
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,342,000	35,650,000	35,648,542	0	35,648,542	100	1,458
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	89,820,000	90,900,000	90,900,000	0	90,900,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	141,180,000	152,040,000	152,040,000	0	152,040,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,849,000	7,652,000	7,650,535	0	7,650,535	99.98	1,465
511128	Belanja Tunj. Beras PNS	116,843,000	132,874,000	132,873,440	0	132,873,440	100	560
511129	Belanja Uang Makan PNS	675,480,000	556,786,000	556,786,000	0	556,786,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,590,000	8,775,000	8,775,000	0	8,775,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,182,769,000	3,482,254,000	3,482,201,095	456	3,482,200,639	100	53,361
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	26,896,000	24,598,000	24,598,000	0	24,598,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	26,896,000	24,598,000	24,598,000	0	24,598,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,209,665,000	3,506,852,000	3,506,799,095	456	3,506,798,639	100	53,361
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	86,820,000	100,709,000	100,707,421	0	100,707,421	100	1,579
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	2,190,510,000	2,017,799,000	2,017,715,796	0	2,017,715,796	100	83,204
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	69,540,000	51,553,000	51,552,139	0	51,552,139	100	861
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	630,000	629,500	0	629,500	99.92	500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	58,632,000	62,796,000	62,796,000	0	62,796,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,407,902,000	2,233,487,000	2,233,400,856	0	2,233,400,856	100	86,144
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	175,376,000	141,746,000	141,743,600	0	141,743,600	100	2,400
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,040,000	680,000	680,000	0	680,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	101,322,000	107,650,000	107,649,212	0	107,649,212	100	788
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	279,738,000	250,076,000	250,072,812	0	250,072,812	100	3,188
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	265,590,000	266,128,000	266,120,455	0	266,120,455	100	7,545
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	265,590,000	266,128,000	266,120,455	0	266,120,455	100	7,545
5221	Belanja Jasa							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 013
: 05
: 1600
: 418333
: KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Kode Lap : LRAB.S.2
Tanggal : 23/01/25 10:50 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	84,000,000	89,008,000	89,007,500	0	89,007,500	100	500
522112	Belanja Langganan Telepon	2,400,000	1,969,000	1,968,779	0	1,968,779	99.99	221
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	72,411,000	72,410,700	0	72,410,700	100	300
522151	Belanja Jasa Profesi	31,800,000	31,800,000	31,800,000	0	31,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	17,100,000	19,097,000	19,097,000	0	19,097,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	195,300,000	214,285,000	214,283,979	0	214,283,979	100	1,021
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	231,360,000	183,763,000	183,762,500	0	183,762,500	100	500
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,000,000	5,915,000	5,915,000	0	5,915,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180,060,000	123,074,000	123,071,489	0	123,071,489	100	2,511
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	429,420,000	312,752,000	312,748,989	0	312,748,989	100	3,011
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	191,485,000	331,359,000	331,330,443	0	331,330,443	99.99	28,557
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77,700,000	74,850,000	74,850,000	0	74,850,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	269,185,000	406,209,000	406,180,443	0	406,180,443	99.99	28,557
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,867,135,000	3,682,937,000	3,682,807,534	0	3,682,807,534	100	129,466
	JUMLAH BELANJA	7,076,800,000	7,189,789,000	7,189,606,629	456	7,189,606,173	100	182,827

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 23/01/25 6:35 AM
 Tgl Cetak : 23/01/25 10:47 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	511,545,029	631,249,754	(119,704,725)	(18.96)
JUMLAH ASET LANCAR	511,545,029	631,249,754	(119,704,725)	(18.96)
ASET TETAP				
Tanah	1,134,365,660	1,134,365,660	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,831,155,756	7,738,430,388	92,725,368	1.20
Gedung dan Bangunan	10,951,888,797	19,403,517,057	(8,451,628,260)	(43.56)
Aset Tetap Lainnya	69,620,176	69,620,176	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,980,065,125)	(4,511,777,864)	(468,287,261)	10.38
JUMLAH ASET TETAP	15,006,965,264	23,834,155,417	(8,827,190,153)	(37.04)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	113,183,629	(113,183,629)	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	113,183,629	(113,183,629)	(100.00)
JUMLAH ASET	15,518,510,293	24,578,588,800	(9,060,078,507)	(36.86)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	280,295,661	123,007,239	157,288,422	127.87
Pendapatan Diterima Dimuka	3,267,320	9,044,320	(5,777,000)	(63.87)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	283,562,981	132,051,559	151,511,422	114.74
JUMLAH KEWAJIBAN	283,562,981	132,051,559	151,511,422	114.74
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	15,234,947,312	24,446,537,241	(9,211,589,929)	(37.68)
JUMLAH EKUITAS	15,234,947,312	24,446,537,241	(9,211,589,929)	(37.68)
JUMLAH EKUITAS	15,234,947,312	24,446,537,241	(9,211,589,929)	(37.68)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,518,510,293	24,578,588,800	(9,060,078,507)	(36.86)

Keterangan :
 FINAL

Tenggarong, 23 Januari 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kepala

TRIANA AGUSTIN
 NIP 1982082820010122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 23/01/25 12:52 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 10:47 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	511,545,029	0
0.0	131111	Tanah	1,134,365,660	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,831,155,756	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,951,888,797	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	69,620,176	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,665,838,466
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,314,226,659
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	280,295,661
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	3,267,320
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,189,606,173
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	44,998,369	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	333,932,985
0.0	391111	Ekuitas	0	24,446,537,241
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8,504,867	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	36,840,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,545,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,301,731
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	26,198,748
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,390,616,690	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	41,494	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	107,068,938	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	35,648,542	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	90,900,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	152,040,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,650,535	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	132,673,440	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	556,786,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,775,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	24,598,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	100,701,421	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	2,283,181,007	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	51,552,139	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	629,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	62,796,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	141,743,600	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	680,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	107,649,212	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	89,529,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 23/01/25 12:52 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 10:47 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,966,579	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	74,173,850	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	31,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	19,097,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183,762,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123,071,489	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	331,330,443	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,850,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	600,456,474	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109,518,888	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	84,616,909	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	629,145,763	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	16,914,810	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	8,123,223,250	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	17,322,357	0
JUMLAH			37,318,589,984	37,318,589,984

Keterangan :

FINAL

Tenggarong, 23 Januari 2025
Peranggung Jawab UAKPA
Kepala
TIRANA AGUSTIN
NIP. 198208282000122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 03/03/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 17/01/25 7:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	614,334,944	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	16,914,810	0
0.0	131111	Tanah	1,134,365,660	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,738,430,388	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	19,403,517,057	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	69,620,176	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,063,281,992
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,448,495,872
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	113,183,629	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	12,553,500
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	110,453,739
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	9,044,320
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,267,947,452
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	37,822,428	0
0.0	313211	Transfer Keluar	17,602,200	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,214,033,814
0.0	391111	Ekuitas	0	14,383,225,159
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	11,007,342
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,646,131,920
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,305,983
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	20,472,125
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,164,822,060	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	41,329	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	108,697,974	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	30,587,770	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	93,600,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	152,520,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,686,072	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	129,849,060	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	531,138,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,405,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	17,735,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	77,404,894	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	2,463,901,009	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	55,298,868	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,192,888	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115,200,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	146,335,100	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 03/03/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 17/01/25 7:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	680,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	122,297,446	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	78,002,800	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,174,878	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	48,602,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	42,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	17,040,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	214,045,030	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98,807,076	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	163,598,305	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,900,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,093,386,520	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	388,271,594	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	540,214,763	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	56,326,490	0
JUMLAH			38,194,953,218	38,194,953,218

Keterangan :

FINAL

Tenggarong, 17 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala
RIANA ACUSTIN
NIP. 198208282000122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 23/01/25 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 10:50 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,189,606,173
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	44,998,369	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,545,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,524,731
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	26,198,748
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,729,890
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,390,616,690	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,950	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	107,068,938	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,648,542	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	90,900,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	152,040,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,650,535	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	132,673,440	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	556,786,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,775,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	24,598,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	100,707,421	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	2,017,715,796	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51,552,139	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	629,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62,796,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	141,743,600	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	680,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	107,649,212	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	266,120,455	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	89,007,500	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,968,779	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	72,410,700	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	31,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	19,097,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183,762,500	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,915,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123,071,489	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	331,330,443	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,850,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	456

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (418333) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tgl Data : 23/01/25 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 10:50 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			7,234,604,998	7,234,604,998

Keterangan :

FINAL

Tenggarong, 23 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala
TERNA AGUSTIN
196208282000122001



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan HAM
Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Pemasayarakatan
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (418333) Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Samarinda
No. Dokumen : 2024.12.418333.002
Tanggal : 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Hutang Langganan PDAM Bulan Desember TA 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jumal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Masuk
3		Beban Dibayar Di Muka	18		Transfer Keluar
4	X	Beban Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
6		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
7		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Belanja
8		Kas di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
11		Koreksi Antar Beban	26		Penyesuaian Neraca
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		Jurnal Koreksi
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		Penyesuaian Neraca
14		Piutang Jangka Panjang	29		Jurnal Umum
15		Koreksi Lainnya	30		

NO	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Beban Langganan Air	Rp5.235.600,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp5.223.600,-

Keterangan:

Jurnal Hutang Langganan Air Bulan Desember TA 2024

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

NANANG BUDIYONO
NIP.198212042010121002

Tanggal : 31 Desember 2024

Disetujui oleh :
Kepala

TRIANA AGUSTIN
NIP.198208282000122001

Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam oleh :
Operator GLP

PRITA MEIRIKA HARYATI
NIP.199805272017122001

Tanggal : 31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan HAM
Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Pemasayarakatan
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (418333) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Samarinda
No. Dokumen : 2024.12.418333.003
Tanggal : 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Hutang Langganan Telepon Bulan Desember TA 2024

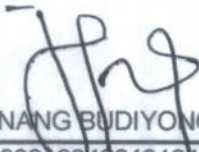
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Masuk
3		Beban Dibayar Di Muka	18		Transfer Keluar
4	X	Beban Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
6		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
7		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Belanja
8		Kas di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
11		Koreksi Antar Beban	26		Penyesuaian Neraca
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		Jurnal Koreksi
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		Penyesuaian Neraca
14		Piutang Jangka Panjang	29		Jurnal Umum
15		Koreksi Lainnya	30		

NO	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	Rp.191.500,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp.191.500,-

Keterangan :
Jurnal Penyesuaian Hutang Langganan Telepon Bulan Desember TA 2024

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi


NANANG BUDIYONO
NIP.198212042010121002

Disetujui oleh :
Kepala


TRIANA AGUSTINI
NIP.198208282000122001

Direkam oleh :
Operator GLP


PRITA MEIRIKA HARYATI
NIP.199805272017122001

Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan HAM
Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Pemasayaran
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (418333) Lembaga Pemasayaran Perempuan Tenggara
No. Dokumen : 2024.12.418333.004
Tanggal : 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Hutang Langganan Internet Bulan Desember TA 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Masuk
3		Beban Dibayar Di Muka	18		Transfer Keluar
4	X	Beban Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
6		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
7		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Belanja
8		Kas di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
11		Koreksi Antar Beban	26		Penyesuaian Neraca
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		Jurnal Koreksi
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		Penyesuaian Neraca
14		Piutang Jangka Panjang	29		Jurnal Umum
15		Koreksi Lainnya	30		

NO	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521111	Beban Keperluan Perkantoran	Rp1.370.850,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp1.370.850,-

Keterangan :

Jurnal Hutang Langganan Internet Bulan Desember 2024.

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi


NANANG BUDIYONO
NIP.198212042010121002

Disetujui oleh :
Kepala


TRIANA AGUSTINA
NIP.198208282000122001

Direkam oleh :
Operator GLP


PRITA MEIRIKA HARYATI
NIP.199805272017122001

Tanggal : 31 Desember 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan HAM
 Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Pemasayarakatan
 Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : (418333) Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Tenggara
 No. Dokumen : 2024.12.418333.005
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Hutang Bahan Makanan Warga Binaan tgl 20 Nov 2024 – 31 Des 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Masuk
3		Beban Dibayar Di Muka	18		Transfer Keluar
4	X	Beban Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
6		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
7		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Belanja
8		Kas di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
11		Koreksi Antar Beban	26		Penyesuaian Neraca
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		Jurnal Koreksi
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		Penyesuaian Neraca
14		Piutang Jangka Panjang	29		Jurnal Umum
15		Koreksi Lainnya	30		

NO	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521112	Beban Pengadaan bahan Makanan	Rp265.465.211,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp265.465.211,-

Keterangan :

Jurnal Hutang Bahan Makanan Warga Binaan tgl 20 Nov 2024 – 31 Des 2024.

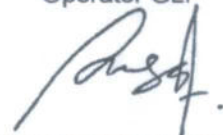
Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi


NANANG BUDIYONO
NIP.198212042010121002

Disetujui oleh :
Kepala


TRIANA AGUSTINI
NIP.198208282000122001

Direkam oleh :
Operator GLP


PRITA MEIRIKA HARYATI
NIP.199805272017122001

Tanggal : 31 Desember 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan HAM
Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (418333) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong
No. Dokumen : 2024.012.418333.001
Tanggal : 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Hutang Langganan Listrik Bulan Desember TA 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Masuk
3		Beban Dibayar Di Muka	18		Transfer Keluar
4	X	Beban Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
6		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
7		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Belanja
8		Kas di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
11		Koreksi Antar Beban	26		Penyesuaian Neraca
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		Jurnal Koreksi
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		Penyesuaian Neraca
14		Piutang Jangka Panjang	29		Jurnal Umum
15		Koreksi Lainnya	30		

NO	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Pembayaran Listrik Desember 2024	Rp8.042.500,-	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		Rp8.042.500,-

Keterangan :

Jurnal Penyesuaian Hutang Langganan Listrik Desember Tahun 2024

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

NANANG BUDIYONO

NIP.198212042010121002

Tanggal : 31 Desember 2024

Disetujui oleh :
Kepala

TRIANA AGUSTIN

NIP.198208282000122001

Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam oleh :
Operator GLP

PRITA MEIRIKA HARYATI

NIP.199805272017122001

Tanggal : 31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan HAM
 Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Pemasayarakatan
 Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
 Satuan Kerja : (418333) Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Tenggara
 No. Dokumen : 2024.12.418333.006
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian pengakuan sewa lahan koperasi Des 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1	X	Pendapatan Diterima Di Muka	16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Masuk
3		Beban Dibayar Di Muka	18		Transfer Keluar
4		Beban Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
6		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
7		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Belanja
8		Kas di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
11		Koreksi Antar Beban	26		Penyesuaian Neraca
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		Jurnal Koreksi
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		Penyesuaian Neraca
14		Piutang Jangka Panjang	29		Jurnal Umum
15		Koreksi Lainnya	30		

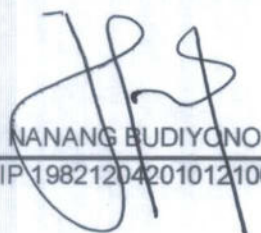
NO	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Gedung, Tanah, Bangunan	Rp3.267.320,-	
	K	219211	Pendapatan Sewa diterima dimuka		Rp3.267.320,-

Keterangan :

Jurnal Penyesuaian pengakuan sewa lahan koperasi Des 2024

Jurnal Penyesuaian pengakuan sewa lahan koperasi Des 2024

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi


NANANG BUDIYO
NIP.198212042010121002

Disetujui oleh :
Kepala


TRIANA AGUSTIN
NIP.198208282000122001

Direkam oleh :
Operator GLP


PRITA MEIRIKA HARYATI
NIP.199805272017122001

Tanggal : 31 Desember 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TAHUN 2024

Kode dan Nama UAKPA : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Kode dan Nama UAPPAW : (1600) Kalimantan Timur
 Kode dan Nama Eselon 1 : (05) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
 Kode dan Nama K/L : (418333) Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓

2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNB		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		✓	Tidak

12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	√		Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada Triwulan III? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	√		Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ada/Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ada/Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ada/Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ada/Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		√	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		√	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calc			

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) * Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Tidak
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak

	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)			Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akruai?			Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai		✓	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	✓		Ya
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai			
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai	✓		Ya
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	✓		Ya
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai			
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai	✓		Ya
	TELAAH LK BLU			
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	✓		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		✓	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	✓		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan	✓		Ya
5	Apakah Nilai SilPA/SilKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	✓		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	✓		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	✓		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	✓		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	✓		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	✓		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	✓		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	✓		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	✓		Ya
	LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN			
	"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk			



Mengetahui
Penyusun LKRL,

(NANANG BUDIYONO)
NIP.198212042010121002

Tenggarong, 31 Desember 2024
Penelaah,

(PRITA MEIRIKA HARYATI)
NIP.199209142017122001